

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018



DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 adalah

sebesar Rp52.270.250,00 atau 93,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.000.000,00 dan realisasi Belanja adalah sebesar Rp31.686.845.578,00 atau 90,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.142.027.467,00.

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp33.024.174.571,44 dan kewajiban sebesar Rp33.142.536,00 serta ekuitas sebesar Rp32.991.032.035,44.
3. Laporan Operasional memberikan informasi aktual mengenai pendapatan dan beban Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Defisit – LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp27.831.509.279,02.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan info Perubahan Ekuitas yang terjadi pada tahun 2018 dengan saldo akhir sebesar Rp32.991.032.035,44.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna

laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Januari 2019

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,

Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2019

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,

Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xi
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xix
NERACA	xx
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
I.A Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
I.B Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
I.C Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
II.A Ekonomi Makro	7
II.B Kebijakan Keuangan	14
II.C Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	16
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	17
III.A Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	17
III.B Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
IV.A Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..	18
IV.B Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan	18

IV.C	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan laporan keuangan	23
IV.D	Penerapan Kebijakan Akuntansi	25
IV.E	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah .	33
BAB V	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	35
V.A	Pendapatan Asli Daerah	35
V.B	Belanja Pegawai	35
V.C	Belanja Barang dan Jasa.....	37
V.D	Belanja Bantuan Sosial	47
V.E	Belanja Modal	47
BAB VI	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	50
VI.A	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	50
VI.B	Beban Dibayar Di Muka	50
VI.C	Persediaan	51
VI.D	Tanah.....	51
VI.E	Peralatan dan Mesin	52
VI.F	Gedung dan Bangunan	54
VI.G	Jalan, Irigasi dan Jaringan	60
VI.H	Aset Tetap Lainnya	60
VI.I	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	61
VI.J	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	62
VI.K	Aset Lainnya	64
VI.L	Utang Beban.....	65
VI.M	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	65
VI.N	Ekuitas.....	66
VI.O	Ekstrakomptabel.....	66
BAB VII	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	67
VII.A	Pendapatan Retribusi Daerah	67

VII.B	Beban Pegawai	67
VII.C	Beban Barang dan Jasa.....	70
VII.D	Beban Bantuan Sosial	78
VII.E	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	79
BAB VIII PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN		
	EKUITAS.....	81
VIII.A	Ekuitas Awal	81
VIII.B	Surplus (Defisit) LO.....	81
VIII.C	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	81
VIII.D	Ekuitas Akhir	81
BAB IX PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON		
	KEUANGAN.....	82
BAB X PENUTUP... ..		
		83

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja selama Tahun 2018 (1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018).

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp52.270.250,00 atau mencapai 93,34% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp56.000.000,00.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp31.686.845.578,00 atau mencapai 90,17% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp35.142.027.467,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	56.000.000,00	52.270.250,00	55.000.000,00	17.981.000,00
Belanja	35.142.027.467,00	31.686.845.578,00	23.904.058.189,00	21.373.670.879,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp33.024.174.571,44 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp8.590.360,00, Aset Tetap sebesar Rp32.994.615.711,44 dan Aset Lainnya sebesar Rp20.968.500,00. Sementara itu jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp33.142.536,00 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp32.991.032.035,44. Ringkasan neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (penurunan)
Aset			
- Aset lancar	8.590.360,00	3.393.420,00	5.196.940
- Aset tetap	32.994.615.711,44	29.188.201.213,46	3.806.414.497,98
- Aset lainnya	20.968.500,00	20.968.500,00	
Kewajiban			
- Kewajiban	33.142.536,00	32.310.288,00	(832.248)
Ekuitas			
- Ekuitas	32.991.032.035,44	29.180.252.845,46	(3.810.779.189,98)

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah pendapatan-LO selama tahun 2018 adalah sebesar Rp52.270.250,00 dan jumlah beban selama tahun 2018 adalah sebesar Rp27.883.779.529,02. Sehingga terdapat Defisit-LO sebesar Rp27.831.509.279,02.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo awal ekuitas awal Rp29.180.252.845,46 dan saldo akhir Rp32.991.032.035,44.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA Perbandingan)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN		56.000.000,00	52.270.250,00	93,34	17.981.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		-	-	-	-
Pendapatan Pajak Daerah					
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A	56.000.000,00	52.270.250,00	93,34	17.981.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER		-	-	-	-
Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		-	-	-	-
Dana Alokasi Umum		-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus		-	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Dana Penyesuaian		-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-	-	-
Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		56.000.000,00	56.000.000,00	93,34	17.981.000,00

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
BELANJA		35.142.027.467,00	31.686.845.578,00	90,17	21.373.670.879,00
BELANJA OPERASIONAL		29.642.920.267,00	26.321.869.474,00	88,80	19.679.861.776,00
Belanja Pegawai	V.B	18.072.202.267,00	15.085.029.341,00	83,47	13.449.408.601,00
Belanja Barang dan Jasa	V.C	10.467.518.000,00	10.140.378.083,00	96,87	5.982.809.425,00
Belanja Bunga		-	-	-	
Belanja Subsidi		-	-	-	
Belanja Hibah	V.D	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	V.E	1.103.200.000,00	1.096.462.050,00	99,39	247.643.750,00
Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	
BELANJA MODAL		5.499.107.200,00	5.364.976.104,00	97,56	1.693.809.103,00
Belanja Tanah	V.F	693.000.000,00	679.410.000,00	98,04	-
Belanja Peralatan dan Mesin	V.G	770.201.200,00	757.751.200,00	98,38	213.792.280,00
Belanja Gedung dan Bangunan	V.H	4.035.906.000,00	3.927.814.904,00	97,32	1.480.016.823,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.I	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
TRANSFER		-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota		-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota		-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota		-	-	-	-
JUMLAH TRANSFER		-	-	-	-
JUMLAH (BEL. OPERASI s.d. TRANSFER)		29.642.920.267,00	26.321.869.474,00	88,80	21.373.670.879,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(35.086.027.467,00)	(31.634.575.328,00)	90,16	(21.355.689.879,00)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(35.086.027.467,00)	(31.634.575.328,00)	90,16	(21.355.689.879,00)

*LRA SKPD format Permendagri 13/2006
Yang terakhir diubah dengan Permendagri 21/2011*

URAIAN	CATATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI 2018	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH		56.000.000,00	52.270.250,00	(3.729.750,00)	7,14
Pendapatan Pajak Daerah					
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A	56.000.000,00	52.270.250,00	(3.729.750,00)	7,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER		-	-	-	-
Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		-	-	-	-
Dana Alokasi Umum		-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus		-	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Dana Penyesuaian		-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-	-	-
Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		56.000.000,00	52.270.250,00	(3.729.750,00)	7,14

URAIAN	CATATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI 2018	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
BELANJA		35.142.027.467,00	31.686.845.578,00	3.455.181.889,00	10,90
BELANJA OPERASIONAL		29.642.920.267,00	26.321.869.474,00	3.321.050.793,00	12,62
Belanja Pegawai	V.B	18.072.202.267,00	15.085.029.341,00	2.987.172.926,00	19,80
Belanja Barang dan Jasa	V.C	10.467.518.000,00	10.140.378.083,00	327.139.917,00	3,23
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	V.D				
Belanja Bantuan Sosial	V.E	1.103.200.000,00	1.096.462.050,00	6.737.950,00	0,61
Belanja Bantuan Keuangan					
BELANJA MODAL		5.499.107.200,00	5.364.976.104,00	134.131.096,00	2,50
Belanja Tanah	V.F	693.000.000,00	679.410.000,00	13.590.000,00	2,00
Belanja Peralatan dan Mesin	V.G	770.201.200,00	757.751.200,00	12.450.000,00	1,64
Belanja Gedung dan Bangunan	V.H	4.035.906.000,00	3.927.814.904,00	108.091.096,00	2,75
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.I				
Belanja Aset Tetap Lainnya					
Belanja Aset Lainnya					
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga					
TRANSFER					
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota					
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota					
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota					
JUMLAH TRANSFER					
JUMLAH (BEL. OPERASI s.d. TRANSFER)		35.142.027.467,00	31.686.845.578,00	3.455.181.889,00	10,90
SURPLUS/(DEFISIT)		(35.086.027.467,00)	(31.634.575.328,00)	(3.451.452.139,00)	10,91

URAIAN	CATATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI 2018	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(35.086.027.467,00)	(31.634.575.328,00)	(3.451.452.139,00)	10,91

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	CATATAN	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (penurunan)	
				Jumlah	%
PENDAPATAN – LO		52.270.250,00	17.981.000,00	34.289.250,00	190,70
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO		52.270.250,00	17.981.000,00	34.289.250,00	190,70
- Pendapatan Pajak Daerah – LO		-	-	-	-
- Pendapatan Retribusi Daerah – LO	VII.A	52.270.250,00	17.981.000,00	34.289.250,00	190,70
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah – LO		-	-	-	-
Pendapatan Transfer – LO					
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO		-	-	-	-
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO		-	-	-	-
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO		-	-	-	-
- Bantuan Keuangan – LO		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO					
- Pendapatan Hibah – LO		-	-	-	-
- Dana Darurat – LO		-	-	-	-
- Pendapatan Lainnya – LO		-	-	-	-
Surplus Non Operasional – LO					
- Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		-	-	-	-
- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		-	-	-	-
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa – LO					
- Pendapatan Luar Biasa – LO		-	-	-	-
BEBAN					
Beban Operasi		27.883.779.529,02	21.255.657.420,46	6.628.122.108,56	31,18
Beban Pegawai – LO	VII.B	15.083.524.253,00	13.438.713.541,00	1.644.810.712,00	12,24
Beban Barang dan Jasa	VII.C	10.145.002.979,00	5.961.998.735,75	4.183.004.243,25	70,16
Beban Bunga		-	-	-	-
Beban Subsidi		-	-	-	-

Uraian	CATATAN	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (penurunan)	
				Jumlah	%
Beban Hibah	VII.D				
Beban Bantuan Sosial	VII.E	1.096.462.050,00	247.643.750,00	848.818.300,00	342,76
Beban Penyusutan dan Amortisasi	VII.F	1.558.790.247,02	1.607.301.393,71	(48.511.146,69)	(3,02)
Beban Penyisihan Piutang					
Beban Lain-lain	VII.G				
Beban Transfer					
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya		-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa		-	-	-	-
Defisit Non Operasional					
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		-	-	-	-
Beban Luar Biasa					
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
SURPLUS/ DEFISIT – LO		(27.831.509.279,02)	(21.237.676.420,46)	(6.593.832.858,56)	31,05

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	CATATAN	Tahun 2018	Tahun 2017
EKUITAS AWAL	VIII.A	29.180.252.845,46	29.068.025.086,92
SURPLUS/ DEFISIT – LO	VIII.B	(27.831.509.279,02)	(21.237.676.420,46)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Revaluasi Aset Tetap			
Koreksi Ekuitas Lainnya	VIII.C	7.713.141,00	(5.785.700,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		31.634.575.328,00	21.355.689.879,00
EKUITAS AKHIR	VIII.D	32.991.032.035,44	29.180.252.845,46

NERACA (Perbandingan)

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (penurunan)	
				Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.A	-	-	-	-
Kas di BLUD		-	-	-	-
Kas Lainnya		-	-	-	-
Setara Kas		-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	VI.B	4.376.860,00	3.393.420,00	983.440,00	28,98
Persediaan		4.213.500,00	-	4.213.500,00	100,00
Jumlah Aset Lancar		8.590.360,00	3.393.420,00	5.196.940,00	153,15
ASET TETAP					
Tanah	VI.C	5.120.399.993,00	5.120.399.993,00	-	-
Peralatan dan Mesin	VI.D	6.342.733.084,02	5.592.466.384,02	750.266.700,00	13,42
Gedung dan Bangunan	VI.E	37.709.979.734,37	33.782.164.830,37	3.927.814.904,00	11,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.F	3.592.302.420,07	2.912.892.420,07	679.410.000,00	23,32
Aset Tetap Lainnya	VI.G	35.569.500,00	35.569.500,00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	VI.H	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	VI.I	(19.806.369.020,02)	(18.255.291.914,00)	(1.551.077.106,02)	8,5
Jumlah Aset Tetap		32.994.615.711,44	29.188.201.213,46	3.806.414.497,98	13,04
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga					
Aset Tidak Berwujud					
Aset Lain-lain	VI.J	20.968.500,00	20.968.500,00	-	-
Jumlah Aset Lainnya		20.968.500,00	20.968.500,00	-	-
JUMLAH ASET		33.024.174.571,44	29.212.563.133,46	3.811.611.437,98	13,05

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (penurunan)	
				(Rp)	%
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-	-	-
Utang Bunga		-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka		-	-	-	-
Utang Beban	VI.K	33.142.536,00	32.310.288,00	(832.248,00)	(2,58)
Utang Jangka Pendek Lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		33.142.536,00	32.310.288,00	(832.248,00)	(2,58)
Kewajiban Jangka Panjang					
Utang Dalam Negeri		-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		33.142.536,00	32.310.288,00	(832.248,00)	(2,58)
EKUITAS					
Ekuitas	VI.M	32.991.032.035,44	29.180.252.845,46	(3.810.779.189,98)	(13,06)
Jumlah		32.991.032.035,44	29.180.252.845,46	(3.810.779.189,98)	(13,06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.024.174.571,44	29.212.563.133,46	(3.811.611.437,98)	(13,05)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

I.A MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu tahun.

Laporan keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan SKPD.

Laporan keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomis maupun non ekonomis. Laporan keuangan SKPD juga menyediakan informasi

tentang peningkatan pembangunan sarana prasarana publik.

I.B LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD Tahun 2018 berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

- tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
27. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.C SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi
- E. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- B. Belanja Pegawai
- C. Belanja Barang dan Jasa
- D. Belanja Modal

BAB VI PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

- A. Kas di Bendahara Pengeluaran
- B. Beban Dibayar di Muka
- C. Persediaan
- D. Tanah
- E. Peralatan dan Mesin
- F. Gedung dan Bangunan
- G. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- H. Aset Tetap Lainnya
- I. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- J. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- K. Aset Lainnya
- L. Utang Beban
- M. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
- N. Ekuitas
- O. Ekstrakomptabel

BAB VII PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

- A. Pendapatan
- B. Beban Pegawai
- C. Beban Barang dan Jasa
- D. Beban Bantuan Sosial
- E. Beban Penyusutan dan Amortisasi

BAB VIII PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- A. Ekuitas Awal
- B. Surplus (Defisit) – LO
- C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- D. Ekuitas Akhir

BAB IX PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB X PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.A EKONOMI MAKRO

II.A.1 Kedudukan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya). Dasar hukum organisasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

II.A.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2008, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, di bidang sosial sesuai dengan

kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan, kerjasama dan pembinaan dibidang sosial skala provinsi;
3. Identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
5. Penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, penganugerahan tanda kehormatan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
6. Penanggulangan korban bencana skala provinsi, pengumpulan uang dan barang;
7. Jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
8. Pengasuhan dan pengangkatan anak; dan
9. Pelaksanaan program/kegiatan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial.

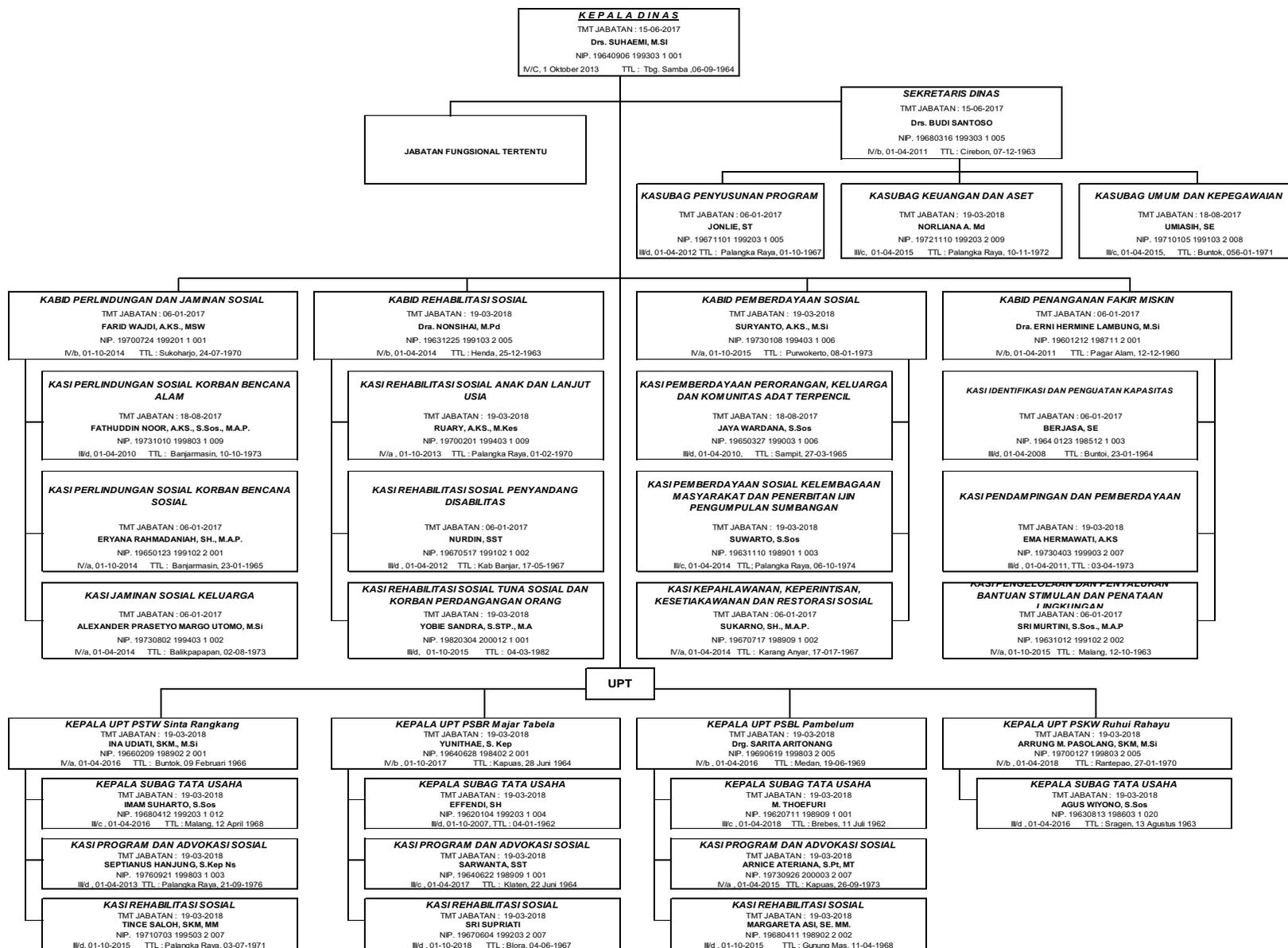
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan rencana bidang sosial skala provinsi;
2. Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerja sama bidang sosial skala provinsi;
3. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi;
4. Penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala provinsi;

5. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerja sama antar kabupaten/kota;
6. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang sosial;
7. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi;
8. Pendidikan dan pelatihan bidang sosial;
9. Alokasi sumber daya manusia potensial;
10. Penelitian bidang sosial mencakup wilayah provinsi;
11. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
12. Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta;
13. Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
14. Mendukung pengembangan pelayanan sosial;
15. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi;
16. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi;
17. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi;
18. Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi;
19. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.

II.A.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018



II.A.4 Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Strategis Internal

a. Adanya struktur organisasi, Visi, Misi dan Strategi mampu memberikan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan dan siapa penanggungjawabnya.

b. Sumber Daya manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja sebuah organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 mempunyai PNS sebanyak 116 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 38 orang dengan rincian:

a) PNS

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S 2	21	18,10
S 1	33	28,45
D IV	9	7,76
D III	12	10,34
SLTA	38	32,77
SLTP	1	0,86
SD	2	1,72
Jumlah	116	

- c. Pedoman pelaksanaan program yang dibuat oleh penanggung jawab program/kegiatan banyak membantu para pelaksana kegiatan di lapangan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan agar tepat waktu, mutu dan sasaran.
- d. Dukungan dana APBN dan APBD.
- e. Suasana kerja cukup kondusif.

2. Lingkungan Strategis Eksternal

- a. Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang-Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial RI, Dinas

- Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan intern Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- e. Dukungan infra struktur, PSM, Karang Taruna, Orsos, TAGANA, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.
 - f. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

II.A.5 Visi dan Misi

1. Visi

“Kesejahteraan Sosial oleh dan Untuk Semua Menuju Masyarakat Kalimantan Tengah Maju, Adil dan Bermartabat”

Hal ini mengandung arti bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari Kesejahteraan Rakyat adalah upaya dan Gerakan Nasional untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 33 dan 34 UUD 1945, oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan sekaligus mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial.

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, misi yang

diemban oleh Dinas Sosial adalah:

- a. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antar pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berkesinambungan.
- b. Mewujudkan penanggulangan masalah sosial yang dapat direspon secara cepat dan tepat.

II.B KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan telah diadakan penandatanganan kerja sama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada:

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan,

efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.

3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas

pembangunan untuk tahun 2018 yaitu:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
6. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7. Penanganan Bencana, Penanggulangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
8. Pelestarian Lingkungan Hidup.
9. Percepatan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya.

Kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2017, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2018, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2018 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

II.C PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja Tahun 2018.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.A IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dana yang ada dianggarkan dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Jumlah Dana DPA-SKPD 2017 Rp35.142.027.467,00 terdiri dari:
Belanja Tidak Langsung = Rp 18.072.202.267,00
Belanja Langsung = Rp 17.069.825.200,00

III.B HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya tidak ada hambatan dan kendala karena semua program dan kegiatan pada Tahun 2018 telah dilaksanakan, serta pada Tahun 2018 Realisasi Keuangan Rp35.142.027.467,00 atau 90,17%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV. A ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. B BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis akuntansi (*accounting basis*)

- a) **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b) **Basis akrual untuk Laporan Operasional** berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
- c) **Basis Kas**, dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- d) **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

- a) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat pemerolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a) Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- b) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*).

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan terlampau rendah atau sengaja mencatat

kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

IV. C BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

b. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

IV. D PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.D.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *cash opname*. Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *cash opname*.

IV.D.2 Piutang

- a) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b) Piutang dapat timbul dari peristiwa pungutan, peristiwa perikatan, peristiwa transfer antar pemerintahan, dan peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah.
- c) Piutang diakui saat timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
- d) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- e) Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*),

yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

- f) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
- Klasifikasi piutang menurut umur
 - Klasifikasi piutang menurut debitur.

IV.D.3 Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berupa (a) barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, (b) bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan (d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- d) Pengakuan beban persediaan diakui dengan (a) pendekatan aset, pengakuan beban persediaan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi (b) pendekatan beban, setiap

pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

- e) Persediaan disajikan sebesar:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- f) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan antara lain rincian/ klasifikasi barang dan jumlah masing-masing klasifikasi dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IV.D.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah**, tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) Peralatan dan Mesin**, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c) **Gedung dan Bangunan**, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) **Jalan, Irigasi dan Jaringan**, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) **Aset Tetap Lainnya**, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama

pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (*maintenance*), perbaikan (*repairs*), penambahan (*additions*), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan: (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (*replacements*) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Nilai penyusutan diakui sejak tanggal perolehan aset tetap.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus di eliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu dilakukan diungkapkan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai dasar penilaian,

rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.

IV.D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari:

- a) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- b) ***Built Operate Transfer*** (BOT), ***Built Transfer Operate*** (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelarasannya Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas *Built Operate Transfer* (BOT), *Built Transfer Operate* (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

- c) Aset Lain-Lain adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga seperti aset rusak berat.

IV.D.6 Kewajiban Jangka Pendek

- a) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang beban, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b) Kewajiban jangka pendek diakui pada saat kewajiban mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban jangka pendek.
- c) Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- d) Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

IV.D.7 Ekuitas

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

IV. E PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang

perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan dan
- d) Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai/ *stakeholders*.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.A Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Penerimaan daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp52.270.250,00 atau 93,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp56.000.000,00. Realisasi penerimaan pada tahun 2017 sebesar Rp17.981.000,00 sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh bangunan kios di UPT Panti Sosial Bina Remaja yang menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah terbesar pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sudah digunakan lagi setelah direhab tahun 2017. Secara garis besar gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018			Realisasi Tahun 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	56.000.000,00	52.270.250,00	93,34	17.981.000,00

Retribusi Daerah: Rp52.270.250,00

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp52.270.250,00 atau 93,34% dari target yang di tetapkan sebesar Rp56.000.000,00 sehingga pada laporan keuangan Tahun 2018 ini Realisasi Penerimaannya masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018.

V.B Belanja Pegawai Rp15.085.029.341,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp18.072.202.267,00,

selama Tahun Anggaran 2018 terealisasikan sebesar Rp15.085.029.341,00 atau 83,47% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.987.172.926,00 atau 16,53% sedangkan realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 sebesar Rp13.449.408.601,00. Rincian realisasi belanja pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Perbandingan dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	18.072.202.267,00	15.085.029.341,00	13.449.408.601,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.567.022.267,00	7.309.697.341,00	7.417.088.851,00
- Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.168.254.488,00	5.641.608.069,00	5.731.113.153,00
- Belanja Tunjangan Keluarga	535.856.356,00	497.184.442,00	460.687.538,00
- Tunjangan jabatan	438.620.000,00	355.560.000,00	279.450.000,00
- Tunjangan Fungsional	252.976.450,00	159.905.000,00	122.460.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	166.530.000,00	148.770.000,00	169.580.000,00
- Tunjangan Beras	321.590.992,00	283.596.720,00	287.941.920,00
- Tunjangan PPh/Khusus	426.125.140,00	53.977.616,00	178.913.697,00
- Pembulatan gaji	452.835,00	83.023,00	75.974,00
- Belanja luran Jaminan Kesehatan	218.974.728,00	145.023.222,00	160.329.661,00
- Belanja luran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14.833.785,00	10.661.895,00	11.794.151,00
- luran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	22.807.493,00	13.327.354,00	14.742.757,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.444.200.000,00	5.822.572.000,00	4.442.275.000,00
- Tambahan penghasilan Beban Kerja	5.035.200.000,00	4.512.922.000,00	3.684.750.000,00

Uraian	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	165.000.000,00	165.000.000,00	120.000.000,00
- Tambahan Penghasil Uang Makan	2.244.000.000,00	1.144.650.000,00	637.525.000,00
Belanja Honorarium PNS	469.780.000,00	428.880.000,00	381.774.750,00
- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	226.900.000,00	206.200.000,00	160.694.750,00
- Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00
- Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	241.680.000,00	221.480.000,00	220.480.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	1.591.200.000,00	1.523.880.000,00	1.208.270.000,00
- Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.591.200.000,00	1.523.880.000,00	1.208.270.000,00

V.C Belanja Barang dan Jasa Rp10.140.378.083,00

Belanja barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp10.467.518.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp10.140.378.083,00 atau 96,87% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp327.139.917,00 atau 3,13%. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan anggaran dan realisasi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.982.809.425,00.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
- Belanja Bahan Pakai Habis	1.203.760.150,00	1.185.065.815,00	748.177.825,00
- Belanja Bahan/Material	281.969.950,00	269.115.650,00	121.514.575,00

Uraian	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
- Belanja Jasa Kantor	924.340.600,00	881.291.934,00	890.327.377,00
- Belanja Premi Asuransi	73.955.350,00	50.293.450,00	43.078.244,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	367.800.000,00	350.006.089,00	128.512.146,00
- Belanja Cetak Dan Penggandaan	431.016.950,00	428.264.350,00	164.655.100,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	368.450.000,00	356.154.000,00	105.860.000,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00
- Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	9.000.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman	1.869.443.500,00	1.786.895.350,00	1.461.965.350,00
- Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	196.000.000,00	194.076.000,00	-
- Belanja Pakaian Kerja	208.283.000,00	205.924.500,00	80.395.000,00
- Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	10.800.000,00	10.800.000,00	3.250.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	4.466.798.500,00	4.368.711.945,00	2.218.573.808,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	38.400.000,00	27.279.000,00	-
Jumlah	10.467.518.000,00	10.140.378.083,00	5.982.809.425,00

V.C.1 Belanja Pakai Habis Kantor Rp1.185.065.815,00

Belanja Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar Rp1.203.760.150,00 atau 11,50% dari total Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Selama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi Rp1.185.065.815,00 atau 98,45% sehingga terdapat sisa anggaran Rp18.694.335,00 atau 1,55%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, maka terdapat kenaikan Belanja Pakai Habis. Rincian Realisasi Belanja Pakai Habis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja alat tulis kantor	372.187.900,00	368.698.115,00	99,06	210.555.925,00
- Belanja alat alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	85.000.000,00	84.995.000,00	99,99	74.501.750,00
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17.750.000,00	17.670.000,00	99,55	12.240.000,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	335.350.000,00	327.424.300,00	97,64	264.087.900,00
- Belanja dokumentasi	23.065.000,00	18.415.000,00	79,84	13.845.000,00
- Belanja bahan dekorasi	79.356.500,00	78.203.900,00	98,55	38.247.000,00
- Belanja bahan perlombaan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	17.570.000,00
- Belanja bahan praktik keterampilan	174.550.750,00	174.139.500,00	99,76	117.130.250,00
- Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	94.500.000,00	93.520.000,00	98,96	-
Jumlah	1.203.760.150,00	1.185.065.815,00	98,45	748.177.825,00

V.C.2 Belanja Bahan/Material Rp269.115.650,00

Belanja Bahan/Material dianggarkan sebesar Rp281.969.950,00 atau 2,69% dari total Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember telah terealisasi sebesar Rp269.115.650,00 atau 95,44% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.854.300,00 atau 4,56%. Dibandingkan dengan Tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi anggaran Belanja bahan/material. Rincian Realisasi Belanja Bahan/Material adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja bahan baku bangunan	121.527.000,00	119.669.550,00	98,47	74.257.675,00
- Belanja Persediaan Makanan Pokok	126.192.950,00	121.236.100,00	96,07	37.756.900,00
- Belanja bahan perlengkapan kantor	34.250.000,00	28.210.000,00	82,36	9.500.000,00
Jumlah	281.969.950,00	269.115.650,00	95,44	121.514.575,00

V.C.3 Belanja Jasa Kantor Rp881.291.934,00

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp924.340.600,00 atau 8,83% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Selama Tahun 2018 telah terealisasikan sebesar Rp881.291.934,00 atau 95,34% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp43.048.666,00 atau 4,66%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan realisasi Belanja Jasa Kantor. Rincian realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja telpon	20.000.000,00	19.968.059,00	99,84	16.815.185,00
- Belanja air	6.000.000,00	5.549.130,00	92,49	6.892.610,00
- Belanja listrik	339.070.600,00	330.869.652,00	97,58	341.209.296,00
- Belanja surat kabar/ majalah	15.895.000,00	15.580.000,00	98,02	35.830.000,00
- Belanja kawat/ faksimili/ internet	49.600.000,00	46.152.593,00	93,05	39.037.786,00
- Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	837.500,00	55,83	84.492.500,00
- Belanja jasa service peralatan/ perlengkapan kantor	47.500.000,00	47.465.000,00	99,93	46.320.000,00
- Belanja honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber	283.350.000,00	264.950.000,00	93,51	208.190.000,00
- Belanja jasa penyiaran melalui media massa	61.405.000,00	53.000.000,00	86,31	10.450.000,00

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja jasa pihak ketiga	100.020.000,00	96.920.000,00	96,90	101.090.000,00
Jumlah	924.340.600,00	881.291.934,00	95,34	902.825.357,00

V.C.4 Belanja Premi Asuransi Rp50.293.450,00

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp73.955.350,00 atau 0,71% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp50.293.450,00 atau 68,01% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.661.900,00 atau 31,99%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan Belanja Premi Asuransi. Rincian realisasi Belanja Premi Asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja premi asuransi kesehatan	62.505.350,00	39.789.000,00	63,66	32.898.000,00
- Belanja premi asuransi barang milik daerah	11.450.000,00	10.504.450,00	91,74	10.180.244,00
Jumlah	73.955.350,00	50.293.450,00	68,01	43.078.244,00

V.C.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp350.006.089,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp367.800.000,00 atau 3,51% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Selama Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp350.006.089,00 atau 95,16% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.793.911,00 atau 4,84%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat peningkatan realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor. Rincian realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja jasa service	38.000.000,00	37.923.619,00	99,80	12.598.376,00
- Belanja penggantian suku cadang	179.000.000,00	178.651.400,00	99,81	44.957.570,00
- Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas	112.730.000,00	112.491.470,00	99,79	63.625.500,00
- Belanja pajak kendaraan bermotor	38.070.000,00	20.939.600,00	55,00	7.330.700,00
Jumlah	367.800.000,00	350.006.089,00	95,16	128.512.146,00

V.C.6 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp428.264.350,00

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp431.016.950,00 atau 4,12% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp428.264.350,00 atau 99,36% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.752.600,00 atau 0,64%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Belanja Cetak dan Penggandaan. Rincian Belanja Belanja Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja cetak	230.057.400,00	227.953.400,00	99,09	70.699.000,00
- Belanja penggandaan	200.959.550,00	200.310.950,00	99,68	93.956.100,00
Jumlah	431.016.950,00	428.264.350,00	99,36	164.655.100,00

V.C.7 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir Rp356.154.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp368.450.000,00 atau 3,52% dari total anggaran Belanja

Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp356.154.000,00 atau 96,66% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.296.000,00 atau 3,34%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja sewa gedung/kantor/ tempat	263.950.000,00	262.830.000,00	99,58	44.400.000,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	104.500.000,00	93.324.000,00	89,31	61.460.000,00
Jumlah	368.450.000,00	356.154.000,00	96,66	105.860.000,00

V.C.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp10.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 atau 0,10% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan anggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas. Rincian realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja sewa sarana mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	7.500.000,00
Jumlah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	7.500.000,00

V.C.9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp16.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dianggarkan

sebesar Rp16.500.000,00 atau 0,16% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp16.500.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor mengalami kenaikan. Rincian realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja sewa sound system	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	9.000.000,00
Jumlah	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	9.000.000,00

V.C.10 Belanja Makanan dan Minuman Rp1.786.895.350,00

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp1.869.443.500,00 atau 17,86% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp1.786.895.350,00 atau 95,58%, sehingga terdapat sisa anggaran Rp82.548.150,00 atau 4,42%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi anggaran Belanja Makanan dan Minuman. Rincian realisasi Belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja makanan minuman rapat	347.488.500,00	319.576.500,00	91,97	114.400.000,00
- Belanja makanan minuman tamu	1.521.955.000,00	1.467.318.850,00	96,41	1.347.565.350,00
Jumlah	1.869.443.500,00	1.786.895.350,00	95,58	1.461.965.350,00

V.C.11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dianggarkan sebesar Rp196.000.000,00 atau 1,87% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp194.076.000,00 atau 99,02% sehingga terdapat sisa anggaran Rp1.924.000,00 atau 0,98%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi anggaran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya. Rincian realisasi belanja Pakaian Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja pakaian Dinas Harian (PDH)	196.000.000,00	194.076.000,00	99,02	-
Jumlah	196.000.000,00	194.076.000,00	99,02	-

V.C.12 Belanja Pakaian Kerja **Rp205.924.500,00**

Belanja Pakaian Kerja dianggarkan sebesar Rp208.283.000,00 atau 1,99% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp205.924.500,00 atau 98,87% sehingga terdapat sisa anggaran Rp2.358.500,00 atau 1,13%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi anggaran Belanja Pakaian Kerja. Rincian realisasi belanja Pakaian Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja pakaian kerja lapangan	208.283.000,00	205.924.500,00	98,87	80.395.000,00
Jumlah	208.283.000,00	205.924.500,00	98,87	80.395.000,00

V.C.13 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu **Rp10.800.000,00**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu dianggarkan

sebesar Rp10.800.000,00 atau 0,10% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp10.800.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu. Rincian realisasi belanja Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja pakaian batik tradisional	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	3.250.000,00
Jumlah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	3.250.000,00

V.C.14 Belanja Perjalanan Dinas Rp4.368.711.945,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp4.466.798.500,00 atau 42,67% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp4.368.711.945,00 atau 97,80% sehingga terdapat sisa anggaran Rp98.086.555,00 atau 2,20%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas. Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.129.674.850,00	3.057.824.076,00	97,70	1.293.440.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.337.123.650,00	1.310.887.869,00	98,04	925.133.808,00
Jumlah	4.466.798.500,00	4.368.711.945,00	97,80	2.218.573.808,00

V.C.15 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp27.279.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan sebesar Rp38.400.000,00 atau 0,37% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp27.279.000,00 atau 71,04% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.121.000,00 atau 28,96% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	38.400.000,00	27.279.000,00	71,04	-
Jumlah	38.400.000,00	27.279.000,00	71,04	-

V.D Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Rp1.096.462.050,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp1.103.200.000,00 atau 3,14% dari total anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi anggaran Sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.096.462.050,00 atau 99,39% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.737.950,00 atau 0,61%. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja bansos barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	923.200.000,00	916.600.050,00	99,29	223.265.750,00
- Belanja bansos Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	180.000.000,00	179.862.000,00	99,92	24.378.000,00
Jumlah	1.103.200.000,00	1.096.462.050,00	99,39	247.643.750,00

V.E Belanja Modal

Kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp5.499.107.200,00 atau 15,65% dari total anggaran belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar

Rp5.364.976.104,00 atau 97,56% dari jumlah anggaran sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp134.131.096,00 atau 2,44% sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.693.809.103,00. Rincian realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	693.000.000,00	679.410.000,00	98,04	-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	9.901.200,00	9.901.200,00	100	-
- Belanja Modal Pengadaan Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60	-
- Belanja modal pengadaan meubelair	332.510.000,00	323.110.000,00	97,17	34.935.000,00
- Belanja modal pengadaan alat pembersih	35.000.000,00	34.920.000,00	99,77	-
- Belanja modal pengadaan alat pendingin	118.990.000,00	116.680.000,00	98,06	58.397.500,00
- Belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)	58.800.000,00	58.344.000,00	99,22	28.450.000,00
- Belanja modal pengadaan personal komputer	183.700.000,00	183.556.000,00	99,92	75.158.780,00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-	-	-
- Belanja modal pengadaan komputer mainframe	-	-	-	2.994.000,00
- Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer	-	-	-	2.373.000,00
- Belanja modal pengadaan peralatan studio visual	-	-	-	5.740.000,00
- Belanja modal pengadaan alat komunikasi telephone	16.300.000,00	16.300.000,00	100	-

Uraian	Tahun Anggaran 2018			Tahun Anggaran 2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
- Belanja modal pengadaan alat komunikasi radio VHF	-	-	-	5.744.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.778.906.000,00	1.746.946.504,00	98,20	807.867.550,00
- Belanja modal pengadaan bangunan gedung untuk pos jaga	83.300.000,00	80.334.000,00	96,44	-
- Belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi/pool	193.806.000,00	189.808.000,00	97,94	-
- Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya	1.300.550.000,00	1.286.529.700,00	98,92	-
- Belanja modal pengadaan bangunan rumah negara golongan III	223.700.000,00	214.023.000,00	95,67	-
- Belanja modal pengadaan bangunan gedung pertokoan/ koperasi/ pasar	-	-	-	672.149.273,00
- Belanja modal pengadaan bangunan mess/ wisma/ bungalow/ tempat peristirahatan	455.644.000,00	410.173.700,00	90,02	-
Jumlah	5.499.107.200,00	5.364.976.104,00	97,56	1.693.809.103,00

Rekapitulasi realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Modal Tanah	693.000.000,00	679.410.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770.201.200,00	757.751.200,00	213.792.280,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.035.906.000,00	3.927.814.904,00	1.480.016.823,00
Jumlah	5.499.107.200,00	5.364.976.104,00	1.693.809.103,00

BAB VI
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

VI.A Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00.

VI.B Beban Dibayar Di Muka

Saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.376.860,00 dan Rp3.393.420,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran periode berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Beban Dibayar Di Muka merupakan biaya asuransi barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	1.187.990,00	950.391,00
2.	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang	483.803,00	387.043,00
3.	Trauma Center	385.107,00	306.085,00
4.	UPT Panti Sosial Karya Wanita	629.694,00	502.756,00
5.	UPT Panti Sosial Bina Remaja	635.885,00	508.709,00
6.	Mess/ Asrama Kenari	127.769,00	66.646,00
7.	Mess/ Asrama Kutilang	83.307,00	66.646,00
8.	Gudang Bencana	756.430,00	605.144,00
9.	UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum	86.875,00	
	Jumlah	4.376.860,00	3.393.420,00

VI.C Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.213.500,00 dan Rp0,00. Persediaan tersebut merupakan Persediaan Alat Tulis Kantor.

VI.D Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.799.809.993,00 dan Rp5.120.399.993,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo
Saldo per 31 Desember 2017	5.120.399.993,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	679.410.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(679.410.000,00)
Saldo per 31 Desember 2018	5.120.399.993,00

- a. Mutasi penambahan dari pembelian merupakan Pengadaan Pematangan Lahan dan Pengaspalan Halaman Jalan PSBL Pabelum sebesar Rp679.410.000,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Pematangan Lahan dan Pengaspalan Halaman Jalan PSBL Pabelum sebesar Rp29.900.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/525/DINSOS.I tanggal 14 Februari 2018.
 - Pekerjaan Fisik Pematangan Lahan dan Pengaspalan Halaman Jalan PSBL Pabelum sebesar Rp617.210.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Graha Jaya Abadi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/4269/DINSOS.I tanggal 22 Oktober 2018.

- Pekerjaan Pengawasan Pematangan Lahan dan Pengaspalan Halaman Jalan PSBL Pabelum sebesar Rp25.300.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/4256/DINSOS.I tanggal 22 Oktober 2018.
 - Biaya Perolehan Pematangan Lahan dan Pengaspalan Halaman Jalan PSBL Pabelum sebesar Rp7.000.000,00
- b. Mutasi pengurangan sebesar Rp679.410.000,00 merupakan pembelian pada tahun 2018 karena bukan merupakan pembelian tanah, melainkan pekerjaan pematangan lahan dan pengaspalan halaman, sehingga direklas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

VI.E Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.350.217.584,02 dan Rp5.592.466.384,02. Mutasi Peralatan dan Mesin selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo
Saldo per 31 Desember 2017	5.592.466.384,02
Mutasi Tambah:	
Pembelian	757.751.200,00
Reklasifikasi Masuk	9.901.200,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(17.385.700,00)
Saldo per 31 Desember 2018	6.342.733.084,02
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	5.046.071.170,02
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.296.661.914,00

a. Penjelasan transaksi penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp767.652.400,00 adalah sebagai berikut:

1) Mutasi penambahan dari pembelian sebesar Rp757.751.200,00 merupakan pengadaan tahun 2018 yang terdiri dari:

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp197.416.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Dua Karunia berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/521/DINSOS.I tanggal 14 Februari 2018 dengan biaya perolehan sebesar Rp3.730.000,00.
- Pengadaan Alat Pendingin sebesar Rp115.445.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Tahasak Miwan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3907/DINSOS.I tanggal 20 September 2018 dengan biaya perolehan sebesar Rp1.235.000,00.
- Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp14.940.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Tata Bangun Konstruksi berdasarkan Nota Pesanan Nomor 903/3505/DINSOS.I tanggal 20 September 2018.
- Pengadaan Meubelair sebesar Rp120.130.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Multi Usaha berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3909/DINSOS.I tanggal 20 September 2018.
- Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong sebesar Rp34.920.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Reihan Jaya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3911/DINSOS.I tanggal 20 September 2018.
- Pengadaan Televisi sebesar Rp58.344.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Mahakarya Utama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3910/DINSOS.I tanggal 20 September 2018.
- Pengadaan Meubelair sebesar Rp199.640.000 yang dilaksanakan oleh CV. Sekar Sari Utama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/4046/DINSOS.I tanggal

28 September 2018 dengan biaya perolehan sebesar Rp2.050.000,00.

- Pengadaan pembelian peralatan taman sebesar Rp9.901.200,00

2) Mutasi penambahan reklasifikasi masuk sebesar Rp9.901.200,00 merupakan reklasifikasi dari pengadaan Alat Pertanian dan Peternakan ke Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga.

b. Penjelasan transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.385.700,00 adalah sebagai berikut:

1) Reklasifikasi keluar sebesar Rp9.901.200,00 merupakan reklasifikasi Alat Pertanian dan Peternakan ke Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

2) Reklasifikasi keluar sebesar Rp7.484.500,00 merupakan reklasifikasi ke Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih karena bukan merupakan aset tetap.

VI.F Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp37.709.979.734,37 dan Rp33.782.164.830,37. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo
Saldo per 31 Desember 2017	33.782.164.830,37
Mutasi Tambah:	
Pembelian	3.927.814.904,00
Reklasifikasi Masuk	
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	
Saldo per 31 Desember 2018	37.709.979.734,37
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	13.429.370.373,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	24.280.609.361,37

Penjelasan transaksi penambahan tahun 2018 sebesar Rp3.927.814.904,00 adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas sebesar Rp191.208.000,00 terdiri dari:

- Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas sebesar Rp6.990.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/518/DINSOS.I tanggal 14 Februari 2018.
- Pekerjaan Fisik Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas sebesar Rp176.818.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Runa Mandiri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/1559/DINSOS.I tanggal 22 Mei 2018.
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas sebesar Rp4.200.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/1620/DINSOS.I tanggal 28 Mei 2018.
- Biaya perolehan Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas sebesar Rp3.200.000,00

b. Pekerjaan Rehab Ruang Kantor Dinas sebesar Rp645.386.133,00 terdiri dari:

- Pekerjaan Perencanaan Rehab Ruang Kantor Dinas sebesar Rp29.950.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/517/DINSOS.I tanggal 14 Februari 2018.
- Pekerjaan Fisik Rehab Ruang Kantor Dinas sebesar Rp582.661.133,00 yang dilaksanakan oleh CV. Runa Mandiri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2512/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
- Pekerjaan Pengawasan Rehab Ruang Kantor Dinas sebesar Rp21.950.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Kahayan Cipta

- Bersama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2518/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
- Biaya perolehan Rehab Ruang Kantor Dinas sebesar Rp10.825.000,00.
- c. Pekerjaan Rehab Ruang Belajar Panti Sosial Bina Remaja sebesar Rp289.429.700,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Rehab Ruang Belajar Panti Sosial Bina Remaja sebesar Rp16.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/497/DINSOS.I tanggal 12 Februari 2018.
 - Pekerjaan Fisik Rehab Ruang Belajar Panti Sosial Bina Remaja sebesar Rp260.929.700,00 yang dilaksanakan oleh CV. Tata Bangun Konstruksi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2514/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018 dan addendum Surat Perintah Kerja Nomor 903/4145/DINSOS.I tanggal 10 Oktober 2018.
 - Pekerjaan Pengawasan Rehab Ruang Belajar Panti Sosial Bina Remaja sebesar Rp8.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2510/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
 - Biaya perolehan Rehab Ruang Belajar Panti Sosial Bina Remaja sebesar Rp4.500.000,00
- d. Pekerjaan Rehab Asrama I PSKW dan Rehab Kamar/WC Asrama II PSKW sebesar Rp410.173.700,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Rehab Asrama I PSKW dan Rehab Kamar/WC Asrama II PSKW sebesar Rp28.200.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/482/DINSOS.I tanggal 9 Februari 2018.

- Pekerjaan Fisik Rehab Asrama I PSKW dan Rehab Kamar/WC Asrama II PSKW sebesar Rp360.514.700,00 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Karya Mandiri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2511/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018 dan addendum Surat Perintah Kerja Nomor 903/4150/DINSOS.I tanggal 10 Oktober 2018.
 - Pekerjaan Pengawasan Rehab Asrama I PSKW dan Rehab Kamar/WC Asrama II PSKW sebesar Rp12.140.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2492/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
 - Biaya perolehan Rehab Asrama I PSKW dan Rehab Kamar/WC Asrama II PSKW sebesar Rp9.319.000,00
- e. Pekerjaan Pembangunan Kantor UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp1.101.560.371,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kantor UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp37.995.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/309/DINSOS.I tanggal 19 Januari 2018.
 - Pekerjaan Fisik Pembangunan Kantor UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp999.415.371,00 yang dilaksanakan oleh CV. Jaka Indo Tama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2513/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
 - Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kantor UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp36.900.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2498/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.

- Biaya perolehan Pembangunan Kantor UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp27.250.000,00
- f. Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp222.023.000,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp10.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2410/DINSOS.I tanggal 10 Agustus 2018.
 - Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dinas UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp199.823.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Andika Kencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3918/DINSOS.I tanggal 20 September 2018.
 - Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp8.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3936/DINSOS.I tanggal 20 September 2018.
 - Biaya perolehan Pembangunan Rumah Dinas UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp4.200.000,00
- g. Pekerjaan Pembangunan Pagar UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp987.700.000,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp44.600.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/414/DINSOS.I tanggal 26 Januari 2018.
 - Pekerjaan Fisik Pembangunan Pagar UPT Panti Sosial Bina

- Laras Pambelum sebesar Rp895.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Prasetya Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2515/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebesar Rp34.800.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2495/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.
 - Biaya perolehan Pembangunan Pagar UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebesar Rp13.300.000,00
- h. Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga, Papan Nama, dan Tiang Bendera UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebesar Rp80.334.000,00 terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga, Papan Nama, dan Tiang Bendera UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebesar Rp2.500.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hastareka Ekakarsa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2423/DINSOS.I tanggal 10 Agustus 2018.
 - Pekerjaan Fisik Pembangunan Pagar Pos Jaga, Papan Nama, dan Tiang Bendera UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebesar Rp74.834.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Andika Kencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/2515/DINSOS.I tanggal 24 September 2018.
 - Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pos Jaga, Papan Nama, dan Tiang Bendera UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum sebesar Rp2.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Rancang Megah Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 903/3949/DINSOS.I tanggal 20 Agustus 2018.

- Biaya perolehan Pembangunan Pos Jaga, Papan Nama, dan Tiang Bendera UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum sebesar Rp1.000.000,00

VI.G Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp3.592.302.420,07 dan Rp2.912.892.420,07. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo
Saldo per 31 Desember 2017	2.912.892.420,07
Mutasi Tambah:	
Pembelian	
Reklasifikasi Masuk	679.410.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	
Saldo per 31 Desember 2018	3.592.302.420,07
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	1.330.927.477,00
Saldo per 31 Desember 2018	2.261.374.943,07

Mutasi penambahan reklasifikasi masuk sebesar Rp679.410.000,00 merupakan reklas dari tanah, karena bukan merupakan pembelian tanah melainkan pekerjaan pematangan lahan dan pengaspalan halaman.

VI.H Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp35.569.500,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Mutasi transaksi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo
Saldo per 31 Desember 2017	35.569.500,00
Mutasi Tambah: Pembelian	
Mutasi Kurang: Reklasifikasi Keluar	
Saldo per 31 Desember 2018	
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	
Saldo per 31 Desember 2018	35.569.500,00

VI.I Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

VI.J Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp19.806.369.020,02 dan Rp18.255.291.914,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan 31 Desember 2018	Akm. Penyusutan 31 Desember 2018	Penyesuaian Saldo Awal	Akum. Penyusutan 1 Januari 2018	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan 31 Desember 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7	9=2-8
Tanah	5.120.399.993,00	-	-	-	-	-	-	5.120.399.993,00
Peralatan dan Mesin	6.342.733.084,02	4.480.165.713,00	-	4.480.165.713,00	565.905.457,02	-	5.046.071.170,02	1.296.661.914,00
Alat-alat Berat	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	-	-	900.000,00	-
Alat-alat Angkutan	1.154.705.353,00	840.150.040,00	-	840.150.040,00	118.350.764,00	-	958.500.804,00	196.204.549,00
Alat Bengkel/ Alat Ukur	66.250.000,00	66.075.833,00	-	66.075.833,00	174.167,00	-	66.250.000,00	-
Alat Pertanian dan Peternakan	44.028.417,00	44.028.417,00	-	44.028.417,00	-	-	44.028.417,00	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4.577.980.889,02	3.146.908.104,00	-	3.146.908.104,00	395.050.851,02	-	3.541.958.955,02	1.036.021.934,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	469.292.425,00	363.310.239,00	-	363.310.239,00	48.632.675,00	-	411.942.914,00	57.349.511,00
Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Laboratorium	29.576.000,00	18.793.080,00	-	18.793.080,00	3.697.000,00	-	22.490.080,00	7.085.920,00
Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	37.709.979.734,37	12.566.755.922,00	(7.713.141,00)	12.559.042.781,00	870.327.592,00	-	13.429.370.373,00	24.280.609.361,37
Bangunan Gedung	37.462.012.479,37	12.554.048.666,00	(7.713.141,00)	12.546.335.525,00	865.368.246,00	-	13.411.703.771,00	24.050.308.708,37
Bangunan Monumen	247.967.255,00	12.707.256,00	-	12.707.256,00	4.959.346,00	-	17.666.602,00	230.300.653,00

Aset Tetap	Nilai Perolehan 31 Desember 2018	Akm. Penyusutan 31 Desember 2018	Penyesuaian Saldo Awal	Akum. Penyusutan 1 Januari 2018	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan 31 Desember 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+6-7	9=2-8
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.592.302.420,07	1.208.370.279,00	-	1.208.370.279,00	122.557.198,00	-	1.330.927.477,00	2.261.374.943,07
Jalan dan Jembatan	1.813.516.711,59	607.270.178,00	-	607.270.178,00	64.746.222,00	-	672.016.400,00	1.141.500.311,59
Bangunan Air (Irigasi)	250.019.273,32	37.702.186,00	-	37.702.186,00	13.835.158,00	-	51.537.344,00	198.481.929,32
Instalasi	892.509.435,16	369.212.244,00	-	369.212.244,00	28.030.738,00	-	397.242.982,00	495.266.453,16
Jaringan	636.257.000,00	194.185.671,00	-	194.185.671,00	15.945.080,00	-	210.130.751,00	426.126.249,00
Aset Tetap Lainnya	35.569.500,00	-	-	-	-	-	-	35.569.500,00
Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	35.569.500,00	-	-	-	-	-	-	35.569.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	52.800.984.731,46	18.255.291.914,00	-	18.247.578.773,00	1.558.790.247,02	-	19.806.369.020,02	32.994.615.711,44

- a. Transaksi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap merupakan beban penyusutan selama tahun 2018 sebesar Rp1.558.790.247,02.
- b. Transaksi pengurangan penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp7.713.141,00 merupakan penyesuaian saldo awal yang disebabkan oleh atribusi aset tetap.

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan 31 Desember 2018	Akum. Penyusutan 31 Desember 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
1	Tanah	5.120.399.993,00	-	5.120.399.993,00
2	Peralatan dan Mesin	6.342.733.084,02	5.046.071.170,02	1.296.661.914,00
3	Gedung dan Bangunan	37.709.979.734,37	13.429.370.373,00	24.280.609.361,37
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.592.302.420,07	1.330.927.477,00	2.261.374.943,07
5	Aset Tetap Lainnya	35.569.500,00	-	35.569.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Jumlah		52.800.984.731,46	19.806.369.020,02	32.994.615.711,44

VI.K Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20.968.500,00. Aset Lainnya merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan serta tidak diketahui keberadaannya. Mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2017	Penyesuaian		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Lainnya	1.607.460.351,00	-	-	1.607.460.351,00
Rusak Berat	8.150.000	-	-	8.150.000
Tidak Diketahui Keberadaannya	1.599.310.351,00	-	-	1.599.310.351,00

Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2017	Penyesuaian		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.586.491.851,00	-	-	1.586.491.851,00
Rusak Berat	8.150.000,00	-	-	8.150.000,00
Tidak Diketahui Keberadaannya	1.578.341.851,00	-	-	1.578.341.851,00
Nilai Buku	20.968.500,00			20.968.500,00

VI.L Utang Beban

Utang beban merupakan jasa yang sudah dipakai dari pihak lain tetapi belum dibayar atas pemakaian jasa tersebut. Utang Beban per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp33.142.536,00 dan Rp32.310.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Utang Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017
a. Utang Beban Pegawai			
1.	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	-	1.399.500,00
2.	Beban Pembulatan Gaji – LO	-	450,00
3.	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus – LO	-	63.153,00
4.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan – LO	-	41.985,00
	Sub Jumlah (a)	-	1.505.088,00
No.	Jenis Utang Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017
b. Utang Beban Barang dan Jasa			
1.	Beban Jasa telepon	2.577.911,00	1.354.719,00
2.	Beban Jasa air	333.450,00	392.720,00
3.	Beban Jasa listrik	26.512.785,00	25.311.401,00
4.	Beban Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet	3.718.390,00	3.746.360,00
	Sub Jumlah (b)	33.142.536,00	30.805.200,00
	JUMLAH (a+b)	33.142.536,00	32.310.288,00

VI.M Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp32.991.032.035,44 dan Rp29.180.252.845,46. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

VI.N EXTRACOMPTABLE

Saldo barang ekstrakomptabel pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp307.553.302,98 dengan rincian sebagai berikut:

- a. KIB B sejumlah Rp97.848.816,98, berupa:
 - Alat bengkel/alat ukur sebesar Rp70.000,00
 - Alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp97.028.816,98
 - Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp750.000,00
- b. Aset Lainnya-Aset Lain-lainnya sejumlah Rp209.704.486,00 berupa:
 - Alat bengkel/alat ukur sebesar Rp150.000,00
 - Alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp197.676.486,00
 - Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp1.500.000,00
 - Alat-alat kedokteran sebesar Rp700.000,00
 - Alat laboratorium sebesar Rp9.678.000,00

BAB VII
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

VII.A Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Jumlah Pendapatan Asli daerah pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yaitu penyewaan kios, wisma/mess dan aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing sebesar Rp52.270.250,00 dan Rp17.981.000,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebagai berikut

Rincian	2018	2017
Sewa Kios	43.500.000,00	6.880.000,00
Sewa Wisma/Mess	6.470.250,00	9.000.000,00
Sewa Aula	2.300.000,00	2.101.000,00
Jumlah	52.270.250,00	17.981.000,00

VII.B Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.083.524.253,00 dan Rp13.438.713.541,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Gaji dan Tunjangan – LO	7.308.192.253,00	7.406.393.791,00	(1,33)
- Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	5.822.572.000,00	4.442.275.000,00	31,07
- Beban Honorarium PNS – LO	428.880.000,00	381.774.750,00	12,34
- Beban Honorarium Non PNS – LO	1.523.880.000,00	1.208.270.000,00	26,12
Jumlah	15.083.524.253,00	13.438.713.541,00	12,24

VII.B.1 Beban Gaji dan Tunjangan – LO

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan – LO selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.308.192.253,00 dan Rp7.406.393.791,00. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan – LO adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	5.640.208.569,00	5.721.540.805,00	(1,42)
- Beban Tunjangan Keluarga – LO	497.184.442,00	459.896.366,00	8,11
- Beban Tunjangan Jabatan – LO	355.560.000,00	279.450.000,00	27,24
- Beban Tunjangan Fungsional – LO	159.905.000,00	122.460.000,00	30,58
- Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	148.770.000,00	169.580.000,00	(12,27)
- Beban Tunjangan Beras – LO	283.596.720,00	287.941.920,00	(1,51)
- Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus – LO	53.914.463,00	178.952.226,00	(69,87)
- Beban Pembulatan Gaji – LO	82.573,00	76.085,00	8,53
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan – LO	144.981.237,00	160.018.732,00	(9,40)
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja – LO	10.661.895,00	11.767.815,00	(9,40)
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (JKM) – LO	13.327.354,00	14.709.842,00	(9,40)
Jumlah	7.308.192.253,00	7.406.393.791,00	(1,33)

Perbedaan Beban Gaji dan Tunjangan – LO dengan Belanja Gaji dan Tunjangan disebabkan oleh adanya beban gaji dan tunjangan – LO yang sudah diakui karena terdapat penyesuaian beban yang sudah diakui dan baru dibayar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Belanja	Utang Beban Pegawai 2017	Utang Beban Pegawai 2018	Beban
1	2	3	4	5=2+3+4
- Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	5.641.608.069,00	(1.399.500,00)	-	5.640.208.569,00

Uraian	Belanja	Utang Beban Pegawai 2017	Utang Beban Pegawai 2018	Beban
1	2	3	4	5=2+3+4
- Beban Tunjangan Keluarga – LO	497.184.442,00	-	-	497.184.442,00
- Beban Tunjangan Jabatan – LO	355.560.000,00	-	-	355.560.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional – LO	159.905.000,00	-	-	159.905.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	148.770.000,00	-	-	148.770.000,00
- Beban Tunjangan Beras – LO	283.596.720,00	-	-	283.596.720,00
- Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus – LO	53.977.616,00	(63.153,00)	-	53.914.463,00
- Beban Pembulatan Gaji – LO	83.023,00	(450,00)	-	82.573,00
- Beban luran Jaminan Kesehatan – LO	145.023.222,00	(41.985,00)	-	144.981.237,00
- Beban luran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja – LO	10.661.895,00	-	-	10.661.895,00
- Beban luran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (JKM) – LO	13.327.354,00	-	-	13.327.354,00
Jumlah	7.309.697.341,00	(1.505.088,00)	-	7.308.192.253,00

VII.B.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.822.572.000,00 dan Rp4.442.275.000,00. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	4.512.922.000,00	3.684.750.000,00	22,48
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	165.000.000,00	120.000.000,00	37,50
- Beban Tambahan Penghasilan Uang Makan	1.144.650.000,00	637.525.000,00	79,55
Jumlah	5.822.572.000,00	4.442.275.000,00	31,07

VII.B.3 Beban Honorarium PNS – LO

Jumlah Beban Honorarium PNS – LO selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp428.880.000,00 dan Rp381.774.750,00. Rincian Beban Honorarium PNS – LO adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan – LO	206.200.000,00	160.694.750,00	28,32
- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa – LO	1.200.000,00	600.000,00	100,00
- Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang – LO	221.480.000,00	220.480.000,00	0,45
Jumlah	428.880.000,00	381.774.750,00	12,34

VII.B.4 Beban Honorarium Non PNS – LO

Jumlah Beban Honorarium Non PNS – LO selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.523.880.000,00 dan Rp1.208.270.000,00. Rincian Beban Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap – LO adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap – LO	1.523.880.000,00	1.208.270.000,00	26,12
Jumlah	1.523.880.000,00	1.208.270.000,00	26,12

VII.C Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2018

dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.145.002.979,00 dan Rp5.961.998.735,75. Beban Barang dan Jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Bahan Pakai Habis	1.188.336.815,00	748.177.825,00	58,83
- Beban Persediaan Bahan/ Material	269.115.650,00	121.514.575,00	121,47
- Beban Jasa Kantor	883.629.270,00	868.890.625,00	1,70
- Beban Premi Asuransi	49.310.010,00	42.975.306,72	14,74
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	350.006.089,00	129.241.146,03	170,82
- Beban Cetak dan Penggandaan	428.264.350,00	164.655.100,00	160,10
- Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	356.154.000,00	105.860.000,00	236,44
- Beban Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	7.500.000,00	33,33
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.500.000,00	9.000.000,00	83,33
- Beban Makanan dan Minuman	1.786.895.350,00	1.461.965.350,00	22,23
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	194.076.000,00	-	(100,00)
- Beban Pakaian Kerja	205.924.500,00	80.395.000,00	156,14
- Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00	3.250.000,00	232,31
- Beban Perjalanan Dinas	4.368.711.945,00	2.218.573.808,00	96,92
- Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	27.279.000,00	-	(100,00)
Jumlah	10.145.002.979,00	5.961.998.735,75	70,16

VII.C.1 Beban Bahan Pakai Habis

Jumlah Beban Bahan Pakai Habis selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.188.336.815,00 dan Rp748.177.825,00. Rincian Beban Bahan Pakai Habis adalah

sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	364.484.615,00	210.555.925,00	73,11
- Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	84.995.000,00	74.501.750,00	14,08
- Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	17.670.000,00	12.240.000,00	44,36
- Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	334.908.800,00	264.087.900,00	26,82
- Beban Dokumentasi	18.415.000,00	13.845.000,00	33,01
- Beban Bahan Dekorasi	78.203.900,00	38.247.000,00	104,47
- Beban Bahan Perlombaan	22.000.000,00	17.570.000,00	25,21
- Beban Bahan Praktik Ketrampilan	174.139.500,00	117.130.250,00	48,67
- Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	93.520.000,00	-	(100,00)
Jumlah	1.188.336.815,00	748.177.825,00	58,83

Perbedaan Beban Bahan Pakai Habis dengan Belanja Bahan Pakai Habis disebabkan oleh adanya belanja persediaan bahan pakai habis alat tulis kantor yang belum dipakai dan reklas dari belanja aset tetap yang bukan merupakan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Belanja	Penyesuaian	Beban
1	2	3	4=2+3
- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	368.698.115,00	(4.213.500,00)	364.484.615,00
- Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	84.995.000,00	-	84.995.000,00
- Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	17.670.000,00	-	17.670.000,00
- Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	327.424.300,00	7.484.500,00	334.908.800,00
- Beban Dokumentasi	18.415.000,00	-	18.415.000,00
- Beban Bahan Dekorasi	78.203.900,00	-	78.203.900,00
- Beban Bahan Perlombaan	22.000.000,00	-	22.000.000,00
- Beban Bahan Praktik Ketrampilan	174.139.500,00	-	174.139.500,00
- Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	93.520.000,00	-	93.520.000,00
Jumlah	1.185.065.815,00	3.271.000,00	1.188.336.815,00

VII.C.2 Beban Persediaan Bahan/ Material

Jumlah Beban Persediaan Bahan/ Material selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp269.115.650,00 dan Rp121.514.575,00. Rincian Beban Persediaan Bahan/ Material adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	119.669.550,00	74.257.675,00	61,15
- Beban Bahan Perlengkapan Kantor	28.210.000,00	9.500.000,00	196,95
- Beban Persediaan Makanan Pokok	121.236.100,00	37.756.900,00	221,10
Jumlah	269.115.650,00	121.514.575,00	121,47

VII.C.3 Beban Jasa Kantor

Jumlah Beban Jasa Kantor selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp932.939.280,00 dan Rp868.890.625,00. Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Jasa telepon	21.191.251,00	16.574.773,00	27,85
- Beban Jasa air	5.489.860,00	5.379.020,00	2,06
- Beban Jasa listrik	332.071.036,00	321.284.196,00	3,36
- Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	15.580.000,00	35.830.000,00	(56,52)
- Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	46.124.623,00	39.280.136,00	17,42
- Beban Jasa Paket/Pengiriman	837.500,00	84.492.500,00	(99,01)
- Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	47.465.000,00	46.320.000,00	2,47
- Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	264.950.000,00	208.190.000,00	27,26
- Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	53.000.000,00	10.450.000,00	407,18
- Beban Jasa Pihak Ketiga	96.920.000,00	101.090.000,00	(4,13)
Jumlah	883.629.270,00	868.890.625,00	1,70

Perbedaan antara Beban Jasa Kantor dan Belanja Jasa Kantor disebabkan oleh adanya koreksi beban yang seharusnya menjadi beban tahun 2017 sebesar (Rp30.805.200,00) dan beban yang masih terutang sebesar Rp33.142.536,00

Uraian	Belanja	Penyesuaian beban Tahun 2017	Utang Beban Tahun 2018	Beban Tahun 2018
- Beban Jasa telepon	19.968.059,00	(1.354.719,00)	2.577.911,00	21.191.251,00
- Beban Jasa air	5.549.130,00	(392.720,00)	333.450,00	5.489.860,00
- Beban Jasa listrik	330.869.652,00	(25.311.401,00)	26.512.785,00	332.071.036,00
- Beban Jasa Kawat/Faksi mili/ Internet	46.152.593,00	(3.746.360,00)	3.718.390,00	46.124.623,00
Jumlah	402.539.434,00	(30.805.200,00)	33.142.536,00	404.876.770,00

VII.C.4 Beban Premi Asuransi

Jumlah Beban Premi Asuransi selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp49.310.010,00 dan Rp42.975.306,72. Rincian Beban Premi Asuransi adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	39.789.000,00	32.898.000,00	20,95
- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	9.521.010,00	10.077.306,72	(5,52)
Jumlah	49.310.010,00	42.975.306,72	14,74

Perbedaan antara Beban Premi Asuransi dan Belanja Jasa Premi Asuransi disebabkan oleh adanya koreksi beban yang seharusnya menjadi beban tahun 2017 sebesar (Rp30.805.200,00) dan beban yang masih terutang sebesar Rp33.142.536,00 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Belanja	Penyesuaian beban Tahun 2017	Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2018	Beban Tahun 2018
- Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	39.789.000,00	-	-	39.789.000,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.504.450,00	3.393.420,00	(4.376.860,00)	9.521.010,00
Jumlah	50.293.450,00	3.393.420,00	(4.376.860,00)	49.310.010,00

VII.C.5 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Jumlah Beban Perawatan Kendaraan Bermotor selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp350.006.089,00 dan Rp129.241.146,03. Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Jasa Service	37.923.619,00	12.598.376,00	201,02
- Beban Penggantian Suku Cadang	178.651.400,00	44.957.570,00	297,38
- Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	112.491.470,00	63.625.500,00	76,80
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor	20.939.600,00	8.059.700,03	159,81
Jumlah	350.006.089,00	129.241.146,03	170,82

VII.C.6 Beban Cetak dan Penggandaan

Jumlah Beban Cetak dan Penggandaan selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp428.264.350,00 dan Rp164.655.100,00. Rincian Beban Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Cetak	227.953.400,00	70.699.000,00	222,43
- Beban Penggandaan	200.310.950,00	93.956.100,00	113,20
Jumlah	428.264.350,00	164.655.100,00	160,10

VII.C.7 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Jumlah Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp356.154.000,00 dan Rp105.860.000,00. Rincian Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	262.830.000,00	44.400.000,00	491,96
- Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	93.324.000,00	61.460.000,00	51,85
Jumlah	356.154.000,00	105.860.000,00	236,44

VII.C.8 Beban Sewa Sarana Mobilitas

Jumlah Beban Sewa Sarana Mobilitas selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp7.500.000,00. Rincian Beban Sewa Sarana Mobilitas adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	7.500.000,00	33,33
Jumlah	10.000.000,00	7.500.000,00	33,33

VII.C.9 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.500.000,00 dan Rp9.000.000,00. Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Sewa Sound System	16.500.000,00	9.000.000,00	83,33
Jumlah	16.500.000,00	9.000.000,00	83,33

VII.C.10 Beban Makanan dan Minuman

Jumlah Beban Makanan dan Minuman selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.786.895.350,00 dan

Rp1.461.965.350,00. Rincian Beban Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	319.576.500,00	114.400.000,00	179,35
- Beban Makanan dan Minuman Tamu	1.467.318.850,00	1.347.565.350,00	8,89
Jumlah	1.786.895.350,00	1.461.965.350,00	22,23

VII.C.11 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)

Jumlah Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp194.076.000,00 dan Rp80.395.000,00. Rincian Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	194.076.000,00	-	100,00
Jumlah	194.076.000,00	-	100,00

VII.C.12 Beban Pakaian Kerja

Jumlah Beban Pakaian Kerja selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp205.924.500,00 dan Rp80.395.000,00. Rincian Beban Pakaian Kerja adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Pakaian kerja lapangan	205.924.500,00	80.395.000,00	156,14
Jumlah	205.924.500,00	80.395.000,00	156,14

VII.C.13 Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Jumlah Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.800.000,00 dan Rp3.250.000,00. Rincian Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Pakaian Batik Tradisional	10.800.000,00	3.250.000,00	232,31
Jumlah	10.800.000,00	3.250.000,00	232,31

VII.C.14 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.368.711.945,00 dan Rp2.218.573.808,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.057.824.076,00	1.293.440.000,00	136,41
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.310.887.869,00	925.133.809,00	41,70
Jumlah	4.368.711.945,00	2.218.573.809,00	96,92

VII.C.15 Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

Jumlah Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan selama tahun 2018 dan tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.279.000,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	27.279.000,00	-	100,00
Jumlah	27.279.000,00	-	100,00

VII.D Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan adalah masing-masing sebesar Rp1.096.462.050,00 dan Rp247.643.750,00. Beban Bantuan Sosial adalah bantuan kepada masyarakat atau pihak ketiga tanpa ada imbalan. Rincian Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	916.600.050,00	223.265.750,00	310,54
- Beban Bantuan Sosial Kepada Pihak Ketiga	179.862.000,00	24.378.000,00	637,80
Jumlah	1.096.462.050,00	247.643.750,00	342,76

VII.E Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.558.790.247,02 dan Rp1.460.356.909,71. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	567.984.257,02	529.595.099,00	7,25
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	118.350.764,00	118.350.762,00	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	174.167,00	190.000,00	(8,33)
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin		7.324.900,00	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor	25.917.176,00	27.491.411,00	(5,73)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	272.650.832,02	245.104.532,00	11,24
Beban Penyusutan Komputer	90.369.713,00	71.414.556,00	26,54
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.113.130,00	4.678.200,00	30,67
Beban Penyusutan Alat Studio	48.632.675,00	49.869.205,00	(2,48)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	2.078.800,00	1.474.533,00	40,98
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	3.697.000,00	3.697.000,00	-

Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	870.327.592,00	813.827.077,00	6,94
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	513.867.856,00	504.913.451,00	1,77
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	351.500.390,00	303.954.280,00	15,64
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	4.959.346,00	4.959.346,00	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.557.198,00	116.895.448,00	4,84
Beban Penyusutan Jalan	64.746.222,00	59.084.472,00	9,58
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.791.692,00	2.791.692,00	-
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.043.466,00	11.043.466,00	-
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	22.872.006,00	22.872.006,00	-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	5.158.732,00	5.158.732,00	-
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	15.867.770,00	15.867.770,00	-
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	77.310,00	77.310,00	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	39.285,71	(100,00)
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	-	-	-
Beban Penyusutan Barang Tidak Diketahui Keberadaannya	-	39.285,71	(100,00)
Jumlah	1.558.790.247,02	1.460.356.909,71	6,74

BAB VIII

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VIII.A Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29.180.252.845,46 dan Rp32.991.032.035,44.

VIII.B Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp27.831.509.279,02 dan Rp21.237.676.420,46.

VIII.C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp7.713.141,00 terdiri dari

- a) Koreksi penambahan merupakan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp247.548.251,00 karena ada perbedaan saldo awal akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh adanya atribusi aset tetap.
- b) Koreksi pengurangan merupakan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp255.261.392,00 karena ada perbedaan saldo awal akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh adanya atribusi aset tetap.

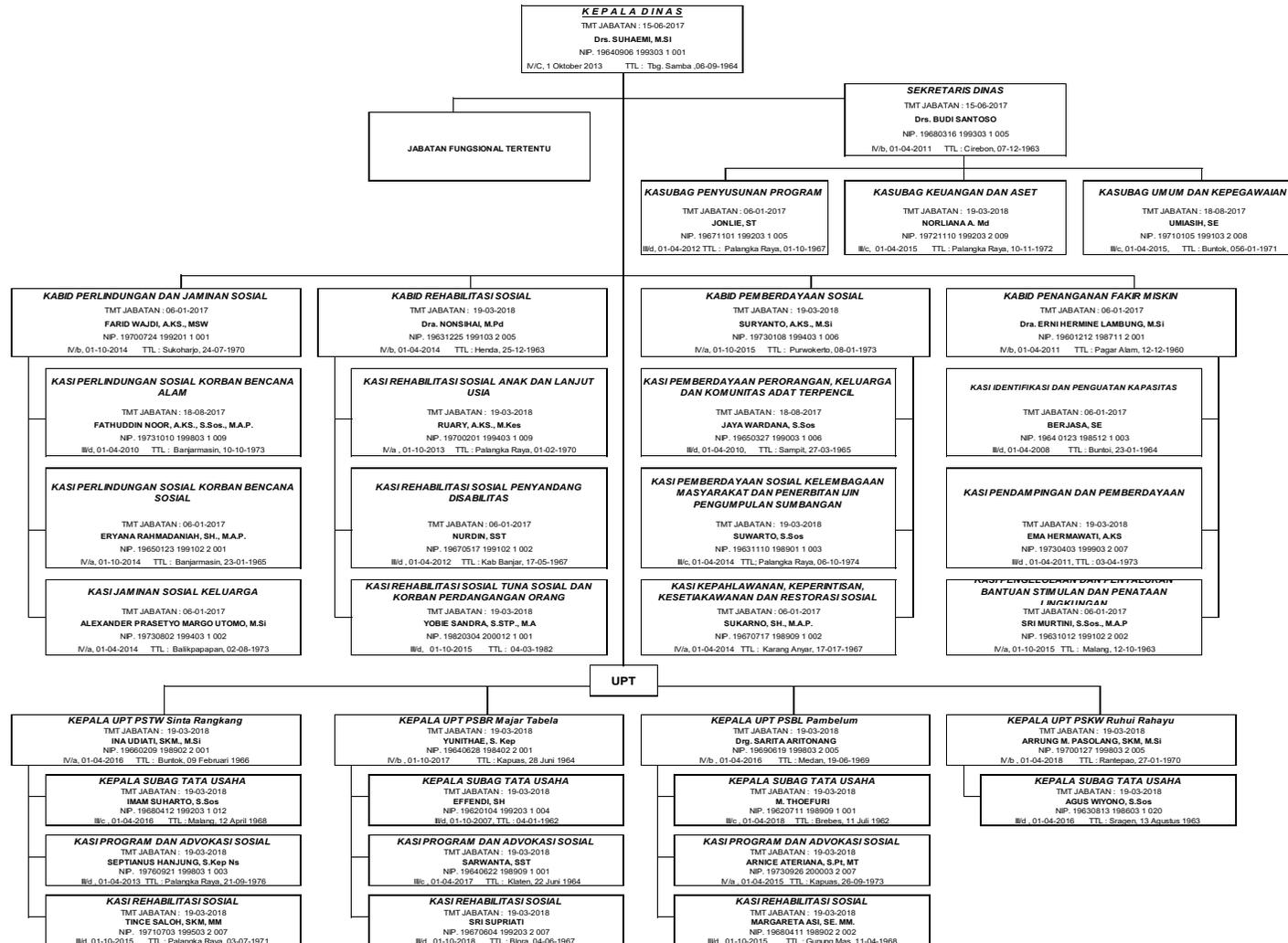
VIII.D Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.991.032.035,44 dan Rp29.180.252.845,46.

BAB IX

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018



BAB X

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001